

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : “Peran Lembaga Amil Zakat di Indonesia Menurut UU No 23 Tahun 2011 Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyah”.

Di Indonesia telah ditetapkan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun dalam hal ini UU NO 23 Tahun 2011 belum efektif dan ideal terlaksana. Dengan demikian tentu peran lembaga amil zakat juga belum sesuai dengan yang diharapkan karena tidak ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menetapkannya.

Maka dalam hal ini, penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan peran lembaga amil zakat di Indonesia menurut UU No 23 Tahun 2011 ditinjau dari perspektif *siyasah maliyah*. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana peran lembaga amil zakat di Indonesia menurut UU No 23 Tahun 2011 dan bagaimana tinjauan *siyasah maliyah* tentang peran lembaga amil zakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga amil zakat di Indonesia menurut UU No 23 Tahun 2011 dan untuk mengetahui tinjauan *siyasah maliyah* tentang peran lembaga amil zakat di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*library research*) atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis data menggunakan metode deskripsi dan metode *content analisis*. Sedangkan metode penulisannya menggunakan metode deskriptif analisis, induktif, dan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Adapun peran lembaga amil zakat di Indonesia menurut UU No 23 Tahun 2011 ialah mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta melaporkan pelaksanaan pengelola zakat kepada pemerintah daerah secara berkala. Namun peran Lembaga Amil Zakat di Indonesia dinilai belum sempurna karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang sanksi atau hukuman bagi orang yang enggan atau lalai dalam membayar zakat. Adapun tinjauan *siyasah maliyah* tentang peran lembaga zakat di Indonesia ialah seharusnya bisa mencerminkan ketentuan yang diamanahkan oleh syariat Islam. Pemerintah dapat meminta secara langsung bahkan memaksa wajib zakat untuk membayar zakatnya sebagaimana yang dilakukan pada masa Rasulullah dan para sahabat yang manajemen zakat mengalami puncaknya sehingga harta zakat melimpah di *bayt-al-mal*. Jika perintah zakat di Indonesia sekarang belum terlaksana sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103, maka peran lembaga amil zakat sebagai penanggungjawab dalam memungut zakat belum sesuai dengan yang diharapkan dengan pengelolaan zakat dalam tinjauan *siyasah maliyah*.